

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
MENUJU DESA MANDIRI (STUDI KASUS DESA SUKARAJA
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)**

SKRIPSI

Oleh

**OTOFIANUS PERAGAYE
NPM 1916021071**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
MENUJU DESA MANDIRI (STUDI KASUS DESA SUKARAJA
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)**

Oleh

OTOFIANUS PERAGAYE

NPM 1916021071

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MENUJU DESA MANDIRI (STUDI KASUS DESA SUKARAJA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh

OTOFIANUS PERAGAYE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa menuju desa mandiri. Desa Sukaraja dipilih sebagai studi kasus karena merupakan representasi dari upaya pembangunan desa mandiri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan desa menuju desa mandiri. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, masyarakat Desa Sukaraja telah berhasil meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi kesadaran akan pentingnya pembangunan desa, ketersediaan sumber daya manusia dan material, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa mandiri. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan desa, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aktor swasta dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Desa Mandiri, Pembangunan

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT TOWARDS AN INDEPENDENT VILLAGE (CASE STUDY OF SUKARAJA VILLAGE, GEDONG TATAAN DISTRICT, PESAWARAN REGENCY)

By

OTOFIANUS PERAGAYE

This study aims to analyze the role of community participation in village development efforts towards an independent village. Sukaraja Village was chosen as a case study because it is a representation of independent village development efforts in Indonesia. The research method used is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of this study show that community participation has a significant role in village development towards an independent village. Through active involvement in various development activities, the people of Sukaraja Village have succeeded in improving their quality of life in a sustainable manner. Factors that affect community participation include awareness of the importance of village development, the availability of human and material resources, and support from the government and related institutions. This research makes an important contribution to the understanding of how community participation can be the main driver in achieving the goal of building an independent village. The implications of this study are the need to strengthen the role of the community in the village development process, as well as the importance of cooperation between the government, the community, and private actors in creating favorable conditions for sustainable village development.

Keywords: Community Participation, Independent Village, Development.

Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA MENUJU DESA MANDIRI
(STUDI KASUS DESA SUKARAJA KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)**

Nama Mahasiswa : **Otofianus Peragaye**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021071**

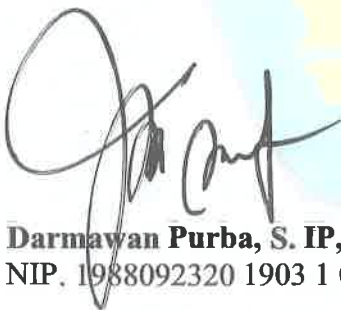
Program studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

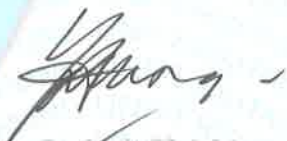
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

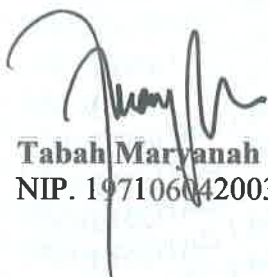


Darmawan Purba, S. IP, M. IP
NIP. 1988092320 1903 1 011



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Tabah Maryanah
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S. IP, M. IP.**



Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juni 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 April 2025
Yang Membuat Pernyataan



Otofianus Peragaye
NPM 1916021071

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Otofianus Peragaye, tempat tanggal lahir Jayawijaya Selasa 02 Mei 2000 tepatnya di Desa Wo'ogi, Kecamatan Silokarno Doga, kabupaten Jayawijaya. Penulis merupakan anak ke dua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Konama Peragaye dan Ibu Manusa Hisage. Memiliki seorang abang Laki-Laki Mikhael Mulait dan adek Laki-Laki Agustinus Peragaye.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2008-2014 di Sekolah Dasar SD YPPK ST. Yohanes Wo'ogi (SD) Desa Wo'ogi, Kecamatan Silokarno Doga. Setelah lulus SD penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wamena , Jayawijaya Tahun 2014-2016. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bangli, Bali Tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur seleksi Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan di nyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis, penulis sebagai anggota biasa HMJ Ilmu Pemerintahan 2019-2020.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2023 selama 40 hari yang dilaksanakan di Desa Sukaraja Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, penulis melaksanakan Kuliah Kerya Nyata (KKN) selama 40 hari secara berkelompok selama 40 hari secara pembagian kelompok penulis melaksanakan sesuai dengan penempatan dari BP-KKN UNILA di Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

Karir di Luar Kampus Penulis dipercayai menjadi kepala Koordinator Peduli Kemanusiaan Dan Pendidikan (PKP) Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL) periode 2020-2021.

Demikian segilintir aktifitas sejak rentang tahun 2019 hingga 2025, seluruh aktifitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tiggi yang yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan mengabdikan.

MOTTO

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-nya, sebab
Ia yang memelihara kamu”

Petrus 5:7

“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik
Dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan.”

(B.J. Habibie)

Yakinlah dengan Iman, Usahakan dengan Iman, Sampaikan
dengan Amal. Dengan niat tulus ikhlas.

“Yakin Usaha Sampai”

Kita tidak tau kapan itu semuanya itu terjadi kita tau semuanya itu
akan terjadi, jadi persiapkanlah dirimu dari sekarang.

(Otofianus Peragaye)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugrah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada : Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakak-kakak dan adikku yang ku sayangi Sebagai tanda bakti, hormat, dan cintaku Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan

Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Semoga amal kebajikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT

Almamater

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang Berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Semoga segala kebaikan Ibu mendapatkan balasan dari Allah SWT dan kebaikan selalu tercurah untuk Ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
2. Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung semoga segala kebaikan Ibu mendapatkan balasan dari Allah SWT dan kebaikan selalu tercurah untuk Ibu di dunia ataupun di akhirat kelak.
3. Bapak Darmawan Purba, S.IP. M.IP selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan ilmu, kritik, saran, masukan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan bapak mendapatkan balasan dari Allah SWT dan kebaikan selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku penguji skripsi, yang telah banyak memberikan banyak ilmu, kritik, saran, masukan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan bapak mendapatkan balasan dari Allah STW dan kebaikan selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Abang Bendi Juantara, S.IP. M.A. selaku mentor selama berkuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Alm Konama Peragaye dan Ibu Manusa Hisage, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, ridho dan doanya dari surga Allah SWT disana. Terima kasih untuk semuanya atas segala pelajaran hidup dan memori-memori kenangan indah yang tersimpan rapih dilubuk hati ini, sehingga menjadikan penulis bisa sekuat ini sampai saat ini. Maaf bila penulis belum bisa menjadi anak yang baik dan belum bisa memberikan yang terbaik, tetapi doaku akan selalu terpanjatkan dan terurai disetiap langkahku untuk kalian disana. Semoga bahagia disurga Allah SWT, amin.
8. Keluarga dan saudara yang selalu membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis, bapak Kornelis paragaye,S.Pd. Dan mama Yuan telah menjadi sosok orang tua yang hebat yang selalu sabar mendidik dan memberikan arahan yang baik bagi penulis. Kakak Medy Paragaye,S.H. yang memberikan nasihat dan arahan bagi penulis, semoga Allah STW memberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan untuk kakak dan keluarga.
9. Sahabat-sahabatku angkatan 20219 Adik Papua Lampung yang selalu suka duka menghadapi bersama-sama semoga kalian bisa menjadi orang-orang hebat di Tanah Papua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
10. Terimakasih banyak keluarga besar Ikatan Mahasiswa Papua Lampung (IKMAPAL) yang selalu saling suport dan membantu semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua.
11. Terimakasih banyak juga teman-temanku Ilmu pemerintahan angkatan 2019 yang saya tidak bisa sebut satu persatu semoga sampai jumpa lain kesempatan.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah STW membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 April 2025

Peneliti

Otofianus Peragaye

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
<i>ABSTRACT</i>	4
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi	13
2.1.1 Konsep Partisipasi.....	13
2.1.2 Pengertian Partisipasi	14
2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	16
2.1.4 Jenis-Jenis Partisipasi Publik	17
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Publik	18
2.1.6 Fungsi dan Manfaat Partisipasi	20
2.2 Tinjauan Tentang Pembangunan	20
2.2.1 Pengertian Pembangunan	20

2.2.2	Tujuan Pembangunan.....	22
2.2.3	Pembangunan Berkelanjutan.....	23
2.3	Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa.....	25
2.3.1	Pengertian Desa.....	25
2.3.2	Ciri-Ciri Desa.....	26
2.3.3	Fungsi Desa.....	27
2.3.4	Jenis-Jenis Desa	28
2.4	Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa.....	31
2.4.1	Pengertian Indeks Desa Membangun.....	31
2.4.2	Indikator Indeks Desa Membangun	31
2.4.3	Klasifikasi Indeks Desa Membangun.....	34
2.5	Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Tipe Penelitian.....	38
3.2	Lokasi Penelitian.....	39
3.3	Fokus Penelitian	39
3.4	Jenis Data Penelitian	40
3.5	Informan Penelitian.....	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7	Teknik Pengolahan Data	42
3.8	Teknik Analisis Data	43
3.9	Teknik Validitas Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM		46
4.1	Sejarah Desa Sukaraja.....	46
4.2	Kondisi Geografis Desa	46
4.3	Kondisi Demografis Desa	47

4.4	Struktur Pemerintahan Desa.....	50
4.5	Visi Pembangunan Desa.....	51
4.6	Misi Pembangunan Desa.....	52
4.7	Sasaran Pembangunan Desa.....	53
4.8	Strategi Pembangunan Desa.....	55
4.9	Tujuan Pembangunan Desa.....	58
BAB V HASIL & PEMBAHASAN		59
5.1	Hasil Penelitian	59
5.1.1	Faktor Desa Mandiri	60
5.2	Pembahasan.....	72
5.2.1	Faktor yang Mendorong Partisipasi Masyarakat.....	72
5.2.2	Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun 74	
5.2.3	Strategi Pembangunan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat.....	76
BAB VI KESIMPULAN & SARAN.....		81
6.1	Kesimpulan	81
6.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.1 Klasifikasi Indeks Desa Membangun.....	35
Tabel 3.1 Informan Penelitian	41
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Dusun	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	48
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	37
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Sukaraja.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Menurut Sumarjadi 2020. Pengertian ini harusnya melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya proses perencanaan untuk pembangunan desa tidak lepas dari pada partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat congyers (dalam Supriatna 2019 mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mempunyai sifat yang sangat penting : (1). partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2). pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan mengetahui seluk-beluk proyek tersebut. (3). timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pada penjelasan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) menjelaskan pada tahapan perencanaan pembangunan diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi :“melibatkan masyarakat (skateholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrembang tingkat desa, musrembang tingkat kecamatan masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah kurangnya masyarakat untuk ikut serta terlibat untuk perencanaan pembangunan hingga musrembang, tingkat kabupaten.

Sudah seharusnya, masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan diri untuk upaya pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Mulai dari menghindari rapat kampung seperti musrembang, dan disitu masyarakat diharapkan dapat mengeluarkan ide-ide mereka untuk rencana dalam kegiatan musrembang tersebut diperlukan sinergi diantara pemerintah kampung dan masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar terciptanya keseimbangan kewenangan antara pemerintah kampung Desa Sukaraja dan masyarakatnya yang difokuskan pada kegiatan musrembang sebagai salah satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang ditinggikan pembangunan. Sesuai dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memajukan daerahnya.

Menurut T. Ndraha (2019) partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu :

- a. pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.

- b. pembangunan, meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu.
- c. membangun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat dapat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal hingga tahap akhir. Oleh karena itu, menurut Koho 2020 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yakni :

1. Partisipasi dalam proses pembuatan Keputusan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan;
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Hakikat pembangunan adalah pembangunan masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa. Kita perlu memahami pembangunan baik dari sisi input (modal) pembangunan maupun dari proses dan tujuan pembangunan, yaitu perekonomian yang baik, masyarakat yang baik dan proses politik yang baik.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Pembangunan sarana dan prasarana desa sangat berkaitan erat dengan pembangunan desa, begitu juga dengan halnya pada desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan kabupaten pesawaran. Karena ketersediaan sarana dan prasarana desa akan sangat berhubungan dengan proses, produksi, konsumsi dan distribusi ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong-royong masyarakat. Atas dasar tersebut maka kesadaran, peran serta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama (Umboh, 2020). Dengan partisipasi dan peran serta bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta bimbingan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Menurut Raharjo (2019) suatu masyarakat dikatakan belum sejahtera jika suatu kondisi seseorang atau suatu kelompok masyarakat masih mengalami berbagai kekurangan baik secara material maupun spiritual menuju kehidupan yang layak sebagai kemanusiaan. Keikutsertaan masyarakat sangat berguna untuk memperbaiki perbagai lingkungan, baik di metropolitan maupun di pedalaman, karena kita bisa melihat dampak yang luar biasa dari kerja sama ini, partisipasi ini juga akan menentukan hasil dari suatu program atau kegiatan yang ada di sekitarnya, kemajuan sebuah program supaya kerja sama daerah tidak akan menentukan kesuksesan sejati. Dengan asumsi itu berjalan secara positif, dukungan daerah juga akan diperlihatkan pada penyusunan maupun proyek supaya strategis berhasil dengan baik, desain yang disusun sangat erat kaitannya dengan kemajuan daerah. Oleh karena itu, masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengambil bagian

dalam partisipasi. Sedangkan desa sendiri memiliki peran utama dalam pembangunan nasional. Karena hampir semua masyarakat Indonesia tinggal di desa, melainkan desa mengajukan bantuan untuk menciptakan pemerataan nasional. Pentingnya perubahan tingkat desa, pemerintah melakukan beberapa cara dalam mendorong mudahnya pembangunan pedesaan sudah dilaksanakan oleh pemerintah namun tidak merata dalam meningkatkan kualitas serta kesejahteraan sosial. Maka pembangunan desa harus dilaksanakan berencana dengan baik dan sesuai keinginan masyarakat desa. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah hanya didasarkan pada paradigma masalah dengan nilai gotong royong dan keterlibatan sosial minim memulai tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun sampai pada pemanfaatan dan evaluasi.

Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan karena program yang direncanakan tidak digunakan lagi terkait dengan pembangunan masyarakat desa. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program perencanaan pembangunan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilannya; partisipasi masyarakat juga berperan. Solekhan, seperti dilancir 2021, terdapat empat tahapan untuk berpartisipasi dalam komunitas :

1. Ikut dalam mengambil keputusan
2. Keterlibatan dalam pelaksanaannya
3. Mengambil bagian untuk mendapatkan keuntungan
4. Mengambil bagian dalam evaluasi

Tahap pertama dalam pembangunan perencanaan, membutuhkan partisipasi masyarakat, karena lahirnya suatu pembangunan tidak didasarkan pada kehebatan rencana pembangunan yang dimiliki, melainkan lebih pada sesuai atau tidaknya pembangunan tersebut dengan kebutuhan masyarakat, maka berhasil atau tidaknya suatu pembangunan tergantung bagaimana proses perencanaannya dibawah. Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan standar kualitas hidup sebanyak mungkin, untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa tahapan-tahapan untuk pelaksanaan harus dilaksanakan dengan maksimal, dan partisipasi masyarakat secara langsung sangat memiliki peran dalam pelaksanaan

program kerja desa yang telah dirancang dengan tujuan agar masyarakat mencapai kesejahteraan. Hal ini memberikan arti bahwa masyarakat harus ikut aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban memberikan pengarahannya, bimbingan dan bantuan dana sebagai upaya pencapaian pembangunan desa yang maju. Dengan demikian sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam musrembang, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan desa yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan catatan resmi dan pola gerak operasional pembangunan desa (SK Mendagri no 42 tahun 1969) menyatakan bahwa “pembangunan desa adalah usaha pembangunan masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh”. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik perlu adanya perencanaan partisipatif sebagai perencanaan yang melibatkan semua rakyat dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan yang dalam tujuan dan prosesnya melibatkan rakyat dan kepentingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai satu kesatuan.

Minat dan perhatian menggunakan metode perencanaan partisipatif di berbagai Negara kiranya cukup beralasan, sebuah metode tersebut mempunyai karakteristik seperti terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipasi (keterlibatan), dinamis, sinergitas, legalitas, serta feasibilitas (realistis). Dalam pembangunan perencanaan partisipatif juga memiliki kriteria yang jelas antara lain adanya pelibatan seluruh stakeholder, adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate, adanya proses politik melalui upaya negosiasi atau rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*), serta adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

Manfaat yang diadakan pemerintah daerah melakukan partisipatif pada pembangunan di Desa Sukaraja pembangunan bertumbuh pada masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan partisipatif yang dalam hal ini tiap-tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan permasalahan dan perumusan kebutuhan perencanaan dan program, pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara pelaku yang terlibat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan sangat membantu pemerintah dalam kendala yang mungkin terjadi dapat dipecahkan bersama-sama sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat”. Manfaat partisipatif masyarakat bagi pemerintah adalah :

1. Menghambat tenaga kerja dan dana pembangunan
2. Mempromosikan pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan kepercayaan diri masyarakat
3. Menjadi modul secara politis dengan cara menunjukan kerja yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan politik dan sosial dengan cara memperkuat kepemimpinan masyarakat
5. Organisasi masyarakat yang kuat dapat menjamin keberlangsungannya.

Sedangkan manfaat yang diperoleh masyarakat melalui partisipatif masyarakat adalah :

1. Hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan lokal dan organisasi masyarakat
3. Secara moral masyarakat merasa memiliki sehingga terjaga kelestariannya dan merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah
4. partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat.

Dampak buruknya jika pembangunan tanpa partisipasi pada masyarakat di Desa Sukaraja :

1. Pemerintah daerah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat

2. Investasi yang ditanamkan di daerah tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan warga
3. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat tidak tertangkap
4. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang tidak tepat
5. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan dibawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, tugas penting manajemen pembangunan untuk pembimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dikaitkan oleh masyarakat. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Bahkan banyak kasus yang menunjukan rakyat menantang upaya pembangunan keadaan itu dapat terjadi oleh beberapa sebab, antara lain :

1. pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil atau tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan di sisi ekstrim dirasakan merugikan
2. pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang mampu memahami hal itu.
3. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaanya tidak sesuai dengan pemahaman itu.
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak ikut sertakan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal, perbedaan tersebut memunculkan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Sukaraja bisa terealisasi sebagaimana mestinya.

Desa berkembang, atau desa disebut juga dengan desa madya, adalah desa yang berpotensi menjadi desa maju, yang mana sudah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi. Desa yang tergolong dalam desa berkembang memiliki IDM kurang dari/sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih dari ($>$) 0,5989. Kemampuan kepala desa juga sangat diperlukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka termotivasi dalam berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mampu menciptakan partisipasi masyarakat yang kuat terhadap pembangunan desa.

Pemerintah Desa Sukaraja memiliki lembaga kemasyarakatan yang berguna untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan pedesaan, tetapi belum efektif pelaksanaannya. Kurangnya aparat pemerintahan desa yang tidak mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan dan pengambilan kebijakan program pembangunan desa. Padahal sudah ada lembaga kemasyarakatan sebagai ruang untuk mengekspresikan tujuan bersama dalam merancang program yang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana tujuan dari pembangunan desa adalah untuk pemerataan kesejahteraan penduduk desa.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu terbuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis / Tahun	Hasil Penelitian
1	Pembangunan di Tingkat Lokal Dalam Otonomi Daerah	Arto Harnoko (2008)	Pada penelitian ini menyatakan bahwa pembangunan di tingkat lokal kaitannya dengan otonomi daerah ada empat bidang prioritas yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, bidang pendidikan. Pemerintah daerah beserta masyarakatnya perlu mengubah cara berfikir bahwa yang diutamakan adalah tercapainya kemandirian masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimiliki daripada pengutamaan pelayanan

No	Judul	Penulis / Tahun	Hasil Penelitian
			yang diberikan kepada penguasa dikarenakan adanya atau dimilikinya otoritas. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran dari daerah-daerah untuk memperkuat sumberdaya manusia dan infrastrukturnya untuk mengantisipasi tuntutan global dalam mencapai kemandirian daerah.
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	Wawan Setiawan (2019)	Pada penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan tarafhidup masyarakat desa. Diantaranya partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa sungai gondang tahun 2018 adalah rendah dengan karakteristik : partisipasi masyarakat dalam kehadiran pada forum pelaksanaan musrenbang rendah mencapai 20% (dua puluh persen). Dan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. Hambatan masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrenbang adalah kurang sosialisasi akan adanya kegiatan usrenbangdesa serta kurangnya kepercayaan masyarakat akan kepemimpinan kepala desa serta masyarakat Merasa terwakili akan kehadiran ketua RT maupun RW.

No	Judul	Penulis / Tahun	Hasil Penelitian
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019	Yulvi IndahRahmawati (2019)	Pada penelitian ini menyatakan menunjukkan bahwa Permasalahanpada penelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, kendala partisipasi masyarakat, dan solusialternatif untuk mengatasi kendala di Desa Pabelan. Kendalapartisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenaipentingnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan. Solusi alternatifnya yaitu supaya diadakan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakatdalam pembagunan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi dalam pembangunan diDesa Pabelan memberikan implikasi bahwa semua desa yangingin maju harus melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil pembangunan.

Sumber : Di olah Peneliti, 2024

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi kasus Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yaitu bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsih pemikiran khusus pada masyarakat dalam pembangunan desa sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan, juga memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan studi Ilmu Pemerintahan

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan daerah di masa yang akan datang. Terutama terkait permasalahan pembangunan di wilayah, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pelaksana kebijakan tata ruang dalam menjalankan kebijakan tata ruangan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk terus meningkatkan peran aktifnya, bagi pemerintah desa untuk terus memberikan ruang, bagi masyarakat serta sebagai data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi

2.1.1 Konsep Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan suatu kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan beberapa persoalan. Partisipasi kewenangan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut Arnstein (2020) menjelaskan partisipasi sebagai arti yang dimana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yaitu : manipulasi, terapi, memberitahu, konsultasi, penentruman kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan control warga Negara. salah satu persyaratan utama keberhasilan proses pembangunan adalah partisipasi masyarakat, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dilapangan dalam proses melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Hambatan akan muncul jika pihak perencana dan pelaksanaan pembangunan (pemerintah) belum memahami secara keseluruhan mengenai konsep

partisipasi. Definisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencanaan dan pelaksana pembangunan adalah kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program yang di pemerintah yang dirancang dan tujuannya sudah ditentukan oleh pemerintah.

Proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah disebut sebagai proyek pembangunan yang berasal dari masyarakat dianggap sebagai keinginan, oleh karena itu proyek ini menjadi prioritas yang rendah dari pemerintah. Definisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi. Oleh karena itu para rencana dan pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah harus memahami secara benar konsep-konsep untuk mendukung lainnya partisipasi masyarakat dari bawah agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam partisipasi karena pendekatan pembangunan partisipasi harus dimulai dari orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pembangunan ini harus menilai dan pengembangan pengetahuan dan dinilai masyarakat dan memberikan sarana yang perlu bagi masyarakat supaya dapat mengembangkan diri. pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program/proyek yang akan mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa ikut dipertimbangkan secara penuh dan membuat umpan balik yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan pembangunan.

2.1.2 Pengertian Partisipasi

Partisipasi secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti turut berperan serta pada suatu kegiatan. partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha dalam mencapai tujuan serta tujuan bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh kaho (dalam Dirjen PMD Depdagri, 2008) bahwa, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor lain, seperti tenaga terlatih, biaya informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah.

Menurut Irene 2019 partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam pencapaian keberhasilan dan berkelanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Menurut T. Ndraha 2020 partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu :

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
- b. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu.
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.
- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting didalam keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, T. Ndraha 2020 mengatakan bahwa partisipasi publik dapat terjadi pada empat jenjang yaitu :

1. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
4. Partisipasi dalam evaluasi

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan menurut Ericson (Slamet 2019), yaitu :

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan (idea plenning stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kemanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan partisipasi dalam tahap pelaksanaan (implementation stage).
2. Partisipasi dalam tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan/proyek. Masyarakat dapat memberikan bantuan, tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan (utili=ation stage) partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan pada suatu pekerjaan/proyek setela proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoprasikan dan melibatkan proyek yang telah dibangun.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Efendi (dalam Irena, 2018) partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal, yaitu :

1. Partisipasi vertikal

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

2. Partisipasi horizontal

Masyarakat mempunyai prakasa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Berbeda dengan pendapatnya Basrowi (dalam Irene, 2018) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Partisipasi non fisik, adalah partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pendidikan nasional dan meratahnya animo masyarakat untuk menuntut ilmu melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak akan kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.
2. Partisipasi fisik, adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya.

2.1.4 Jenis-Jenis Partisipasi Publik

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2018), partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud

partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti : hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam program pelaksanaan sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi jenis ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program yang akan ditandai dengan adanya peningkatan output. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Publik

Menurut Slamet (2020), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

1. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seseorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan. Kedudukan dan derajat, hal ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno et.al (2019) (dalam Yulianti, 2019), bahwa dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa

dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian kecenderungannya bahwa kelompok pria akan lebih banyak partisipasi.

2. Usia

Perbedaan usia akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan munculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal ini tentu seperti, menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan, menurut Soedarno et.al (2021) (dalam Yulianti, 2019). Sedangkan Slamet (2019) mengatakan bahwa usia berpengaruh pada beraktifitas pada seseorang untuk berpartisipasi. Oleh karenanya golongan tua dianggap lebih berpengalaman sehingga akan lebih banyak memberikan pendapat/masukan dalam hal menetapkan keputusan.

3. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan, faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tangkap inovasi (Litwin dalam Yulianti, 2020)

4. Tingkat Penghasilan

Menurut Barros (dalam Yulianti, 2021) bahwa pendudukan yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran secara tunai dan jarang melakukan kerja fisik secara sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

5. Mata Pencaharian

Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal ini menghadiri pertemuan, kerja bakti dan lain-lain.

2.1.6 Fungsi dan Manfaat Partisipasi

Menurut Carter (dalam Santoso, 2021) menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
2. Partisipasi masyarakat sebagai strategi
3. Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
4. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
5. Partisipasi masyarakat sebagai terapi. Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :
6. Menuju masyarakat yang bertanggungjawab
7. Meningkatkan proses belajar
8. Meneliminir perasaan terasing
9. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
10. Menciptakan kesadaran politik
11. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan kepentingan masyarakat
12. Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi.

2.2 Tinjauan Tentang Pembangunan

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya.

Siagian (2019) dalam administrasi pembangunan mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli definisikan yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan, istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supryadi Bratakusumah, 2021).

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus memiliki antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam praktek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitas, supervise, dan pendampingan.

Menurut Siagian, (2021), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja diantara pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan perencanaan yang terarah.

Pembangunan Desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlakukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah. Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi, yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini tentang konsep pembangunan dari PNPM mandiri perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut.

2.2.2 Tujuan Pembangunan

Pembangunan desa yaitu pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan.seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, Karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta

pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan agar berhasil dituntaskan.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap hari di Desa harus sesuai dengan apa yang dihadapi di desa tersebut, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan. Tujuan pembangunan pedesaan adalah terciptanya :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas;
2. Percepatan pertumbuhan desa;
3. Meningkatkan keterampilan dalam produksi dan pengembangan lapangan;
4. Kerja dan lapangan usaha produktif;
5. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat;
6. Perkuatan kelembagaan;
7. Meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat perantau, dalam berbagai usaha dan kegiatan pembangunan untuk wilayah pedesaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 Ayat(4);
8. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada atau yang dapat dikembangkan;
9. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan proyek-proyek sektoral dan regional yang dilaksanakan di wilayah pedesaan.

2.2.3 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. “Ditinjau dari segi istilah sebenarnya pembangunan desa

indektik dengan pembangunan masyarakat desa. Bahwa sejak lahirnya istilah pembangunan masyarakat bahwa mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang historis, sosial, ekonomi, cultural, dan spritual". Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan.

Jumlah penduduk yang besar pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu Negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah yang memungkinkan untuk bisa mengolah potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efesien dan maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat luas suatu bangsa secara terus menerus dan dalam waktu yang mencakup antar generasi berkelanjutan pembangunan menunjuk pada kemampuan untuk tumbuh dan berubah terus menerus agar masyarakat menikmati kesejahteraan sekurang-kurangnya sama dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi.

Dari pengertian pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang dan tetap menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga karena kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan akan berkurang atau bahkan akan hilang.

2.3 Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, (Bouman dalam Amin Suprihatini, 2021). Menurut Unang Sunardjo (dalam Suprihatini 2021) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir yang sangat kuat, baik karenaketerunan maupun karena sama-sama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di wilayah kabupaten daerah. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.

Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau pertain. Istilah desa menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul pemerintah desa/marga, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagamaan, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogeny, mata pencaharian disektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain disekitarnya. Sedangkan pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang pemerintahan sendiri.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Pengertian desa menurut undang-undang adalah: peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 1, desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Negara kesatuan sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 pasal 1, desa adalah desa dan ada yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republic Indonesia serikat.

Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 1, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dibatas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan daerah kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

2.3.2 Ciri-Ciri Desa

Desa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan perkotaan, dimana ciri-ciri desa adalah sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan di tata menjadi homogeny dan bergantung pada bidang pertanian,peternakan,perkebunan dan perikanan.

2. Kepadatan penduduk relatif rendah, rasio penduduk antar wilayah rendah ditunjukkan dengan masih adanya rumah-rumah di desa yang dengan perkarangan yang tidak berdekatan dengan tetangga.
3. Ciri desa selanjutnya adalah interaksi masyarakat desa lebih intens. Salah satu, komunikasi juga bersifat personal agar kita saling mengenal dan saling memnatsu.
4. Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya dan kehidupan yang sama.
5. Mobilitas masyarakat juga cenderung rendah. Memang terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk masyarakat desa jarang bepergian atau pergi ke tempat yang jauh.

2.3.3 Fungsi Desa

Tentunya setiap manusia atau individu akan menggunakan perasaan, pemikiran, dan keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Hal inilah yang membuat manusia saling membutuhkan. Secara umum, fungsi desa adalah sebagai berikut :

1. Desa Sebagai Hinterland

Salah satu fungsi desa yaitu sebagai hinterland atau penyangga yang mensuplai kebutuhan pokok seperti beras, jagung dan ubi kayu. Tidak hanya itu, desa ini juga menyediakan banyak makanan lain seperti kacang-kacangan, sayur mayor dan buah-buahan segala jenis. Selanjutnya desa dari potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan baku dan tenaga kerja. Mengenai kegiatan pekerjaan, desa adalah desa pertanian, desa produksi, desa nelayan dan desa industri.

2. Desa Sebagai Pelestari Kearifan Lokal

Fungsi desa selanjutnya adalah melestarikan kearifan lokal. Ada banyak budaya lokal yang masih ada di masyarakat pedesaan. Dengan adanya desa maka budaya lokal akan selalu terjaga dan akan terus berkembang. Selain itu desa juga merupakan sumber produksi pangan. Penghasilan pangan ini

diperoleh karena wilayah desa memiliki bahan baku dan lahan pertanian yang lebih banyak. Sedangkan pengelolaan dilakukan didalam kota karena transportasi yang lebih mudah dan teknologi yang lebih lengkap.

3. Desa Sebagai Sumber Tenaga Kerja

Penduduk desa yang hidup diatas dasar gotong royong menjadi tenaga produktif dan membangun tenaga atas dasar gotong royong dan saling pengertian. Selain itu, desa juga menjadi sumber tenaga kerja bagi kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk desa kerja di kota sebagai buru atau disektor internal.

4. Desa Sebagai Mitra Pembangunan

Selain menjadi sumber tenaga kerja, masyarakat pedesaan juga berperan sebagai mitra dalam pembangunan perkotaan. Mitra ini cepat atau lambat akan dilaksanakan, tergantung dari hubungan atau kemitraan yang dilakukakn oleh masyarakat dalamnya

2.3.4 Jenis-Jenis Desa

1. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang penduduknya masih menganut atau terikat dengan adat dan tradisi yang ada. Tingkat pendidikan masih tergolong rendah, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih tergolong rendah. Desa swadaya masih tergantung pada sektor produksi untuk melayani kebutuhan utama keluarga, tidak ada usaha produksi untuk melayani kebutuhan industry atau kebutuhan pasar luar. Sehingga potensi juga dapat dimiliki desa tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Ciri-ciri desa swadaya adalah sebagai berikut :

- a. Mata pencaharian masyarakat desa swadaya masih homogeny dan bersifat agraris.
- b. Desa masih tertutup terhadap “pengaruh” lingkungan luar.
- c. Teknologi yang digunakan masyarakat masih lemah, teknologi pertanian atau bahkan industry.
- d. Populasinya kecil; populasinya masih sangat sedikit.

- e. Dalam kehidupan public dan pribadi, patuhi adat istiadat.
- f. Hubungan antar kelompok/interaksi sosial sangat erat.
- g. Keluarga memiliki fungsi pengawasan sosial.
- h. Keberadaan sarana dan prasarana sangat tidak memadai.
- i. Desa/kawasan tersebut masih terisolasi dari desa/kawasan lain.
- j. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari “kebutuhan pangan” masih terpenuhi di desa itu sendiri.

2. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sedang dalam proses pembangunan dengan tingkat kemajuan yang lebih tinggi dari desa swadaya. Pada desa swakarya keberadaan adat istiadat dalam masyarakat mulai atau sedang mengalami peralihan atau transisi, pada desa yang mandiri pengaruh luar mulai masuk, kemudian mengubah cara berfikir desa. Desa swakarya juga ditandai dengan keragaman, pekerjaan masyarakat, mata pencaharian masyarakat mulai berkembang tidak hanya di wilayah utama tetapi juga di wilayah sekunder. Selanjutnya perkembangan sarana dan prasarana desa juga mulai dirasakan, dimana keberadaan sarana dan prasarana tersebut menunjang produktivitas masyarakat desa dalam hal pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Desa swakarya juga biasa dipahami sebagai desa transisi atau peralihan dari desa mandiri menjadi desa mandiri. Ciri-ciri desa swakarya sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan masyarakat mulai meningkat, kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai meningkat.
- b. Jumlah penduduk melebihi desa swadaya dan penduduk mulai berdatangan dari luar desa (pendatang).
- c. Kebiasaan adat istiadat masih hidup tetapi tidak sepenuhnya meningkat
- d. Adanya teknologi mulai dimanfaatkan dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari.
- e. Tingkat perekonomian mulai tumbuh secara bertahap menjadi lebih baik.
- f. Dirasakan sarana dan prasarana seperti jalan menjadi penghubung ke daerah lain dan membuka jalur ekonomi.

- g. Desa swadaya tidak lagi terisolasi seperti desa swakarya, meskipun akses ke jantung perekonomian tidak sepenuhnya mulus.
- h. Kegiatan produksi tidak lagi hanya melayani kebutuhan pokok tetapi juga arah kebutuhan sekunder.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada sering dianggap sebagai labeli desa berkembang atau desa maju. Dari segi makna desa swasembada adalah desa yang lebih maju dari desa mandiri dan tidak lagi terlihat adat. Di desa swasembada ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam atau potensi lokal desa, terkait dengan kegiatan pembangunan lokal/daerah. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran yang tinggi dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan atau meningkatkan potensi desanya menjadi desa yang tumbuh, desa yang maju dan mandiri. Ciri-ciri desa swasembada adalah :

- a. Desa swasembada memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, sehingga pemukiman mulai padat.
- b. Masyarakat sudah tidak terikat lagi dengan adat istiadat, sudah fleksibel.
- c. Dari segi lokasi, desa swasembada biasanya berada di ibu kota kabupaten.
- d. Memiliki pekerjaan umum yang memadai, peralatan dan transtruktur yang lengkap.
- e. Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan efektif.
- f. Kesadaran dan minat masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan desa berteknologi tinggi.
- g. Masyarakat yang beragam; tingkat pendidikan dan latar belakang (ada banyak komunitas imigran).
- h. Kegiatan ekonomi masyarakat berkembang dengan berbagai cara, baik produksi primer maupun produksi sekunder, tidak hanya barang tetapi juga jasa.

2.4 Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

2.4.1 Pengertian Indeks Desa Membangun

Menurut direktorat jenderal pembangunan desa dan perdesaan (2020), indeks desa membangun (IDM) merupakan indeks komposisi yang dibentuk oleh tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan ekologi (IKE). Tiap indeks tersebut memiliki perangkat indikator masing-masing yang dikembangkan berdasarkan suatu konsepsi. Konsepsi tersebut mengatakan bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Dengan mengelola potensi alam secara baik dan berkelanjutan, kebijakan pembangunan dan memperdayakan masyarakat desa diharapkan dapat meningkat pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan, oleh karena itu, ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sama sebagai dimensi yang dapat meningkatkan kemajuan proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan memperdayakan masyarakat desa.

2.4.2 Indikator Indeks Desa Membangun

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang indeks desa pembangunan, indeks desa membangun dibentuk untuk mendorong upaya pemerintah dalam menangani pengetasan desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri berukut merupakan indeks atau indicator IDM beserta dimensinya.

1. Indeks Ketahanan Sosial

a. Modal Sosial

Modal sosial terdiri dari beberapa perangkat indikator. Perangkat indikator yang pertama ialah adanya solidaritas sosial, yakni kebiasaan gotong royong di desa, adanya ruang publik gratis yang terbuka bagi warga, serta adanya fasilitas atau lapangan olahraga dan terdapat klub olahraga. Kedua, memiliki toleransi, yaitu warga desanya terdiri dari beberapa suku atau etnis, menggunakan bahasa yang berbeda-beda pada saat berkomunikasi, dan memiliki keberagaman agama, ketiga, rasa aman penduduk, yaitu pemeliharaan poskamling, partisipasi warga dalam siskamling, tingkat kriminalisasi dan konflik yang terjadi di desa, dan upaya penyelesaian konflik tersebut. Terakhir, kesejahteraan sosial, antara lain adanya akses ke sekolah luar biasa (SLB), tempat penyandang kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, pekerja seks komersial, dan pengemis, dan terdapat warga desa yang bunuh diri.

b. Kesehatan

Kesehatan terdiri dari dua perangkat indikator, yaitu pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan. Pelayanan kesehatan, ialah waktu tempuh untuk menuju ke prasarana kesehatan tidak lebih dari 30 menit, adanya tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan, ialah akses masyarakat desa menuju ke poskedes, dan polindes, dan posyandu, tingkat aktivitas posyandu, dan tingkat partisipasi warga sebagai peserta jaminan kesehatan seperti BPJS.

c. Pendidikan

Pendidikan terdiri dari tiga perangkat indikator, yang pertama adalah akses masyarakat melanjutkan ke pendidikan dasar dan menengah, yang mana akses ke SD/MI tidak lebih dari 3 km serta akses ke SMP/MTS dan SMA/SMK tidak lebih dari 6 km. Kedua, akses pendidikan non-formal, yaitu program pembrantasan buta huruf, PAUD, pusat kegiatan belajar masyarakat/paket ABC, dan akses ke pusat keterampilan/kursus. Ketiga, akses ke pengetahuan, yang indikator taman badan masyarakat atau perpustakaan milik desa.

d. Pemukiman

Pemukiman terdiri dari beberapa indikator, antara lain akses ke air bersih dan air minum layak yaitu sebagian besar penduduk desa telah memiliki sumber air minum yang layak dan tersediinya akses penduduk desa terhadap air untuk memandi dan mencuci, kemudian, akses ke sanitasi, yaitu sebagian besar penduduk memiliki jembatan dan adanya tempat pembuangan sampah. Lalu, akses ke listrik, berupa indikator jumlah keluarga yang telah dialiri oleh listrik. Dan terakhir, akses ke informasi dan komunikasi, yaitu warga desa memiliki telepon seluler dan sinyal yang kuat, adanya siaran televisi lokal, nasional, dan asing, serta adanya akses internet.

2. Indeks Ketahanan Lingkungan

IKL juga hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi ekologi. Dimensi ekologi terdiri dari dua perangkat indikator, yaitu kualitas lingkungan dan upaya terhadap potensi, potensi bencana alam. Kualitas lingkungan ialah ada atau tidaknya pencemaran (bak air, tanah dan udara) serta adanya sungai yang terkena limbah. Sedangkan, upaya terhadap potensi bencana alam ialah upaya tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana. Perlu diketahui bahwa perangkat indikator pada tiap dimensi IDM tersebut dapat sesuai dengan hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian desa yang dilakukan melalui survey pembaharuan data secara berkala.

3. Indeks Ketahanan Ekonomi

IKE hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi terdiri dari enam perangkat indikator. Pertama, keragaman produksi masyarakat desa, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk desa berjumlah lebih dari satu jenis. Kedua, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, antara lain akses penduduk ke pertokoan maupun pasar, adanya warung dan minimarket di sekitar pemukiman, dan adanya kedai makanan, restoran, hotel, serta penginapan. Ketiga, distribusi atau logistik, yakni adanya kantor pos dan

jasa pengiriman. Keempat, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yaitu adanya lembaga perbankan umum, baik pemerintah maupun swasta, adanya bank perkreditan rakyat (BPR), dan akses penduduk ke kredit. Kelima, lembaga ekonomi yaitu adanya lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi. Dan keenam, keterbukaan wilayah, antara lain adanya modal transportasi umum seperti transportasi angkutan umum, trayek regular, dan jam operasi angkutan umum, jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan berroda empat atau lebih sepanjang tahun kecuali saat tertentu, serta kualitas jalan desa, yakni jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil dan tanah.

2.4.3 Klasifikasi Indeks Desa Membangun

Klasifikasi status desa berbagi menjadi lima yang menggambarkan status kemajuan dari kemandirian desa. Berikut merupakan pejabaran untuk masing-masing status desa yang paling baik.

1. Desa mandiri, atau bisa disebut dengan desa semberda, yaitu desa maju yang telah mampu menyelenggarakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa yang tergolong dalam desa mandiri memiliki IDM lebih dari ($>$) 0,8155.
2. Desa maju, atau bisa disebut juga dengan desa pra-sembada, ialah desa yang telah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelola dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa berkembang, atau desa disebut juga dengan desa madya, adalah desa yang berpotensi menjadi desa maju, yang mana sudah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Akan tetapi belum mampu mengelola secara maksimal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa yang tergolong dalam desa berkembang memiliki IDM kurang dari/sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih dari ($>$) 0,5989.

4. Desa tertinggal, atau bisa disebut juga dengan desa pra-madya, merupakan desa yang telah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi. Akan tetapi belum tau kurang mampu mengelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa yang tergolong dalam desa tertinggal memiliki IDM kurang dari/sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih dari ($>$) 0,4907.
5. Desa sangat tertinggal, atau bisa disebut juga dengan desa pratama, adalah desa yang rentan mengalami bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial. IDM kurang dari/sama dengan $IDM \leq 0,4907$

Tabel 2.1 Klasifikasi Indeks Desa Membangun

Status Desa	Skor IDM
Desa Mandiri	$IDM > 0,8155$
Desa Maju	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
Desa Berkembang	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
Desa Tertinggal	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
Desa sangat Tertinggal	$IDM \leq 0,4907$

Sumber : PMD PDTT Nomor 2 Tahun 2016, di olah Kembali oleh Peneliti, 2024

2.5 Kerangka Pikir

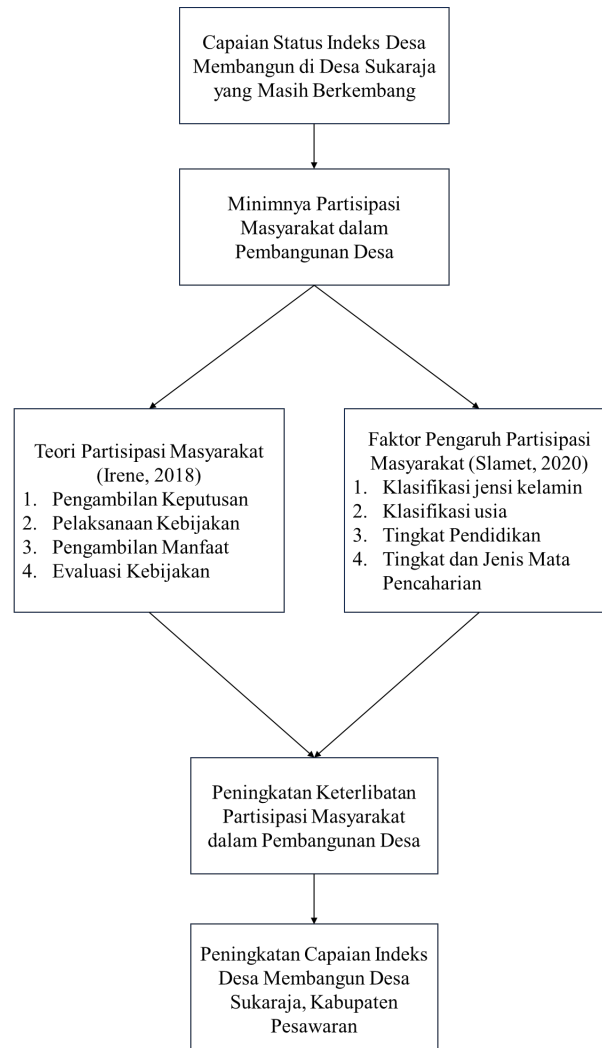
Kultur budaya masyarakat di Indonesia yang telah mendahulukan kepentingan bersama, memajukan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pembangunan desanya. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dalam bentuk swadaya masyarakat adalah partisipasi secara fisik seperti tenaga dan dana maupun non- fisik dalam bentuk pemikiran/saran atau tanggapan bagi kepentingan pembangunan. Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti keaktifan waktu, tenaga dan dana serta

kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka penyumbangan ide bagi kepentingan pembangunan. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memiliki kesempatan secara personal karena sibuk oleh kegiatan individu, tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai/kategori pendidikan miskin serta pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka perlunya optimalisasi.

Skema kerangka pikir ini menunjukkan bahwa penelitian ini dengan kerangka pikir bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dikaji dari empat bidang yaitu bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil. Keempat bidang partisipasi masyarakat ini akan menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa Sukaraja. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Sukaraja ini secara umum akan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal terdiri dari kesadaran, pendidikan, dan penghasilan/pendapatan, faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan pemerintah setempat atau pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia. Keempat faktor ini akan menentukan pelaksanaan program pembangunan di Desa Sukaraja atau faktor internal dan eksternal tersebut akan menentukan pelaksanaan program pembangunan Desa Sukaraja. Berdasarkan hasil analisis ini maka akan memperoleh kesimpulan dan saran yang akan menjadi dasar didalam meningkatkan atau memperbaiki partisipasi masyarakat dimasa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya keterkaitan variabel dan sub-variabel dalam penelitian ini sebagaimana yang digambarkan pada bagan sebagai berikut :

KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber : Di olah Peneliti, 2024

Capaian Indeks Desa Membangun di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang saat ini masih berada di status tertinggal, menjadi permasalahan serius yang melanda desa ini. Salah satu penyebab utama kegagalan tersebut adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Dengan menggunakan teori Irene (2018) yang menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan Teori Slamet (2018) yang mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam peningkatan Indeks Desa Membangun di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitas jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survey sebagai metode pengumpulan data melalui survey memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu :

1. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai
2. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel
3. Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Menurut Sarwono (2020) dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran penelitian kualitatif adalah manusia karena manusia adalah sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah penelitian kualitatif menurut Ruslan (2021) bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kualitatif

dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dari terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian melaksanakan penelitiannya supaya memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian ini dilaksanakan Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk keluar (*inclusion-eksklusion criteria*) suatu informan yang baru diperoleh di lapangan (moleong 2019). Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka yaitu berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mandiri.

3.4 Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dalam moleong (2019) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan observasi, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature yang bersumber dari dokumen Negara berupa peraturan menteri dan surat edaran menteri, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu

teknik purposive sampling (Sugiono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai dianggap paling mengetahui lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan purposive sampling. Adapun daftar nara sumber yang akan mewawancarai yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dimas Malfinas	Kepala Desa
2	Erika	Kaur Keuangan
3	Eko Susanto	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
4	Pulung S, H.I	Pedamping Desa
5	Yudha	Tokoh Masyarakat

Sumber : Data di Olah Peneliti, 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai dengan kebutuhan penelitian antara lain :

1. Observasi

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2020) mengatakan istilah observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencacatan secara sistematis mengenai tingka laku dengan cara melihat atau mengamati langsung kelompok yang dituju. Peneliti melakukan observasi secara partisipan (participant observation) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2020). Tujuan dilakukannya pengamatan ini adalah untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut (Adi, 2018).

2. Wawancara

Wawancara mendalam menurut (Moelong, 2019) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas

dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai fokus pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2021) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang merupakan data sekunder, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis yang lainnya yang digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singaribun, 2020), terdiri dari :

1. Editing Data

Menurut Moh Papundu Tika (2020) editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang di kumpulkan untuk bisa di proses lebih lanjut. Hal yang diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengesiaan kuisioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca konsisten dan lengkap. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan

dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyutihan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungan dan disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari peneliti tersebut.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengaitkan hubungan antara variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima atau kah ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Abror, 2021).

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti Mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari peneliti.

3.8 Teknik Analisis Data

Pada tipe penelitian kualitatif jenis deskriptif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, sudah dapat diolah dan dilakukan analisis. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan lagi data yang dianggap perlu dan dan pengolahannya kembali. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 2018). Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari bila diperlukan. Langkah-langka yang dilakukan peneliti adalah menajamkan analisis, mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 2018). Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahap reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif, bagan, hubungan antara indikator serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

3.9 Teknik Validitas Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkan terhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pemanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek melalui sumber lain. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan sumber yang sama dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Fakhrudin, 2019).

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Desa Sukaraja

Sukaraja pada mulanya adalah merupakan salah satu Dusun yang terdapat di dalam wilayah Desa Gedong Tataan. Kemudian pada tahun 1909 seluruh warga atau masyarakat Dusun Sukaraja menyatakan keinginannya untuk mandiri dan memisahkan diri menjadi sebuah Desa. selanjutnya, keinginan masyarakat tersebut ditampung dan di bahas oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh Agama dalam suatu rapat atau musyawarah Dusun. Kemudian setelah sepakat menjadi satu tekad, hal tersebut di sampaikan pada saat rapat di Desa Gedong Tataan. Setelah disetujui oleh kepala Desa dan lembaga masyarakat Desa Gedong Tataan kemudian diteruskan ke kabupaten melalui Camat Gedong Tataan. Dan pada tahun 1909 Dusun Sukaraja disetujui untuk menjadi sebuah Desa.

4.2 Kondisi Geografis Desa

Desa Sukaraja terletak pada 5°31'55.9" 105°14'13.9"E, dan merupakan dataran dengan ketinggian tanah 143 Mdpl dengan curah hujan sedang 6 bulan hujan dan 6 bulan kemarau, dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- a. Utara : Desa Bageleng
- b. Timur : Desa Kebagusan
- c. Selatan : Desa Bogorejo
- d. Barat : Desa Gedong Tataan

Adapun jarak dari Desa Sukaraja ke pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung, antarlain :

- a. Jarak dari pusat pemerintah ke kecamatan : 0,5 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan ke kabupaten : 4 km
- c. Jarak dari pusat pemerintahan ke provinsi : 19 km
- d. Jarak dari pusat pemerintahan ke pusat : 261 km

4.3 Kondisi Demografis Desa

Desa Sukaraja merupakan pedesaan yang bersifat semi agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani dengan hasil utama padi, kakao dan karet. Sedangkan pencaharian lainnya diantaranya karyawan swasta, PNS, TNI, Polri, Perdagangan/jasa dan buruh tetap maupun buruh harian lepas. Berdasarkan pemuktahiran data pada bulan Januari 2020, desa sukaraja mempunyai jumlah penduduk 9.216 jiwa, terdiri dari 4.865 jiwa, laki-laki 4.351 jiwa, perempuan dan jumlah kepala keluarga 2.596 yang tersebar di 8 dusun yang ada di desa sukaraja dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Dusun

No	Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukaraja I	388	701	665	1.366
2	Sukaraja II	354	578	512	1.090
3	Sukaraja III	346	663	561	1.224
4	Sukaraja IV	470	845	783	1.628
5	Sukaraja V	235	465	460	925
6	Sukaraja VI	357	642	635	1.277
7	Sukaraja VII	209	375	430	805
8	Sukaraja VIII	237	608	407	907
	Jumlah	2.596	4.877	4.351	9.228

Sumber : Desa Sukaraja, di Olah Kembali oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah penduduk dusun memiliki berjumlah Dusun I 1.366, Dusun II 1.090, Dusun III 1.224, Dusun IV 1.628, Dusun V 925, Dusun VI 1.277, Dusun VII 805, Dusun VIII 907. Artinya jumlah masyarakat dusun masing-masing sudah banyak dan untuk kedepannya generasi penerus bangsa yang dapat mengubah keadaan lebih baik.

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Umur	Jumlah
0-4 Tahun	634
5-6 Tahun	348
7-12 Tahun	894
13-15 Tahun	540
16-18 Tahun	604
19-25 Tahun	1.025
26-64 Tahun	4.528
65 Tahun ke atas	656
Jumlah	9.228

Sumber : Desa Sukaraja, di Olah Kembali oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan dari tabel di atas, data penduduk desa Sukaraja berdasarkan usia yakni yang kurang dari 15 tahun berjumlah 2.414 jiwa, jumlah ini yang nantinya beberapa tahun kedepan akan menjadi calon tenaga kerja yang memerlukan kemampuan berkualitas SDM yang memadai. Sedangkan jumlah usia produktif di Desa Sukaraja pada usia 16 sampai 65 keatas dengan jumlah paling besar yang menduduki angka 6.813 jiwa, artinya Desa Sukaraja memiliki keadaan yang menguntungkan dilihat dari usia produktif yang dimiliki pada Desa Sukaraja sehingga pada usia produktif ini masyarakat Desa Sukaraja dapat melakukan kinerja sesuai dengan profesinya yang di harapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Desa Sukaraja dalam pendidikan adalah belum sekolah 981 jiwa, sedangkan belum tamat SD 981 jiwa, SLTP/ sederajat 1.643 jiwa, SD 1.625 jiwa, SLTA/ Sederajat 2.433 jiwa, D1/D2

135 jiwa, D3/Sarjana Muda 208 jiwa, D4/Srta 1 419 Jiwa dan Srata 2 61 jiwa. Jumlah penduduk Desa Sukaraja berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Strata 2	61
D4/Srta 1	419
D3/Sarjana Muda	208
D1/D2	135
SLTA/Sederajat	2.433
SLTP/Sederajat	1.643
SD	1.625
Belum Tamat SD	1.282
Belum Sekolah	981
Jumlah	8.871

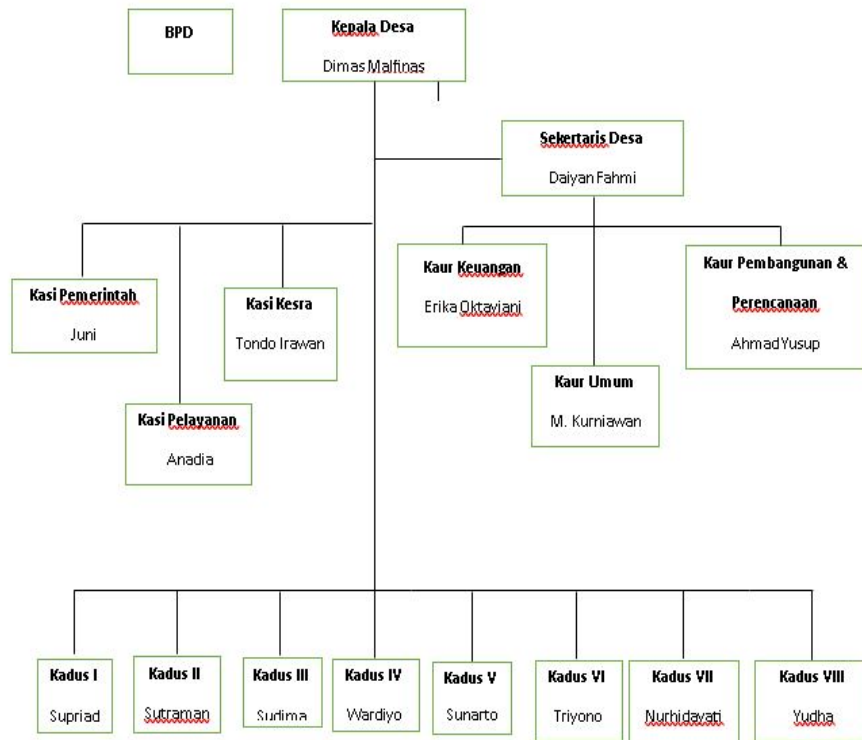
Sumber : Desa Sukaraja, di Olah Kembali oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah penduduk yang masih melakukan kegiatan belajar sangat tinggi yakni berjumlah 5.701 jiwa, artinya pendidikan Sukaraja sangat baik karena masyarakatnya mengutamakan pendidikan pada saat usia dini agar kedepannya menjadi calon penerus generasi bangsa yang dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Selain itu, jumlah pendidikan dengan tamatan Sarjana masih sangat rendah yakni dengan jumlah 823 jiwa, untuk itu orang tua perlu mempertimbangkan lagi terhadap anak-anaknya agar bisa meneruskan pendidikan keperguruan tinggi dengan tidak mencukupkan pendidikan anak pada tamatan SMP maupun SMA.

4.4 Struktur Pemerintahan Desa

Desa merupakan sebuah wilayah administrasi yang berada dibawah tingkat kecamatan, dimana ini merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang dengan disebut Dusun, Kampung, Banjar, maupun Jorong. Menurut peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengantar serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan pada asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Sukaraja meliputi : Organisasi pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Gambaran Pelayanan. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :



Gambar 7.1 Struktur Pemerintahan Desa Sukaraja

Sumber : Desa Sukaraja, 2024

Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Sukaraja meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pelayanan organisasi pemerintahan desa, BPD, kemasyarakatan desa sukaraja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sukaraja yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala desa dan sekretaris desa dibantu kepala urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan pemerintahan, pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

4.5 Visi Pembangunan Desa

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Sukaraju Tahun 2020 2026 disuman berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Dess yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2026 belum menyusun RPJM Desa, maka Visi dan Misi dalam RP/M-Desa ini ditetapkan

untuk Tahun 2020 sd 2026 yang dilakukan dengan pendekatan partisipati melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sukaraja seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 sd 2026 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Desa Tahun 2020-2026 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2016 (Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013), yakni "Terwujudnya Kabupaten Pesawaran yang lebih Sejahtera, Maju dan Amanah". Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sukaraja Tahun 2020-2026 adalah :

"Membangun Desa Sukaraja yang jujur, adil, sejahtera dan berakhlak mulia".

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

4.6 Misi Pembangunan Desa

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Sukaraja

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi:
 - a. Pemerintahan yang transparan, adil, cepat dan benar.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
3. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
4. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip agama dan budaya yang ada
5. Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat meliputi :
 - a. Pemberdayaan SDM terutama perempuan dan karang taruna
 - b. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

4.7 Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan Desa Sukaraja Tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi pertama : Bidang keagamaan "Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama", dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Makin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi Pembangunan "Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran yaitu :

- a. Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - c. Menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - d. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
 - f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - g. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - h. Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
3. Pemerintahan “menciptakan sistem pemerintahan yang jujur, berwibawa dan mengoptimalkan kinerja aparatur desa” untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- a. Terwujudnya pemerintahan yang transparan, adil, cepat dan benar.
 - b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - c. Meningkatkan profesionalisme aparatur desa
 - d. Meningkatkan minat masyarakat untuk gotong royong dan bermusyawarah.
 - e. Meningkatnya hubungan antara kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

4. Kemasyarakatan “memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk beberapa sasaran, yaitu :
 - a. Berkembangnya industri kecil masyarakat.
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meningkatkan kesadaran wisata dan perilaku ramah tamah.
 - f. Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM (Hak Asasi Manusia).

4.8 Strategi Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Sukaraja dilaksanakan untuk menentukan undakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang Tersedia Pembangunan Desa Sukaraja merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan dilaksanakan dengan Pembangunan satu kesatuan Desa Lata Sukaraja perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukaraja Tahun 2020-2026 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Sukaraja yang akan dilaksanakan selama Tahun 2020 -2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Sukaraja yang Mandiri. Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Sukaraja, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekan pada dua hal yaitu Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Sukaraja, Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa sejahtera. Sukaraja yang sejahtera. Pemerintahan Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi pertama dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada Pemerintahan yang transparan, adil, cepat, dan benar. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat. Pembangunan Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi ketiga dalam bidang pembangunan yaitu, Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum. Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada : BPD, LPMD, RT, Karang Taruna dan tokoh masyarakat, peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa.
3. Kemasyarakatan Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kelima dalam bidang kemasyarakatan yaitu Memberdayakan potensi yang ada dimasyarakat meliputi : Pemberdayaan SDM terutama perempuan dan karang taruna melalui pelatihan-pelatihan dalam bidang Perkebunan/Pertanian, Peternakan dan keterampilan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan potensi sumber daya alam Desa dan sumber daya manusia. Dengan masih banyak nya sumber daya alam yang masih tersedia di Desa untuk itu, masyarakat di Desa bisa mengembangkan produk usaha masyarakat agar perekonomian pedesaan bisa meningkat. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana juga adalah sebuah upaya dalam meningkatkan pelayanan kegiatan ekonomi kerakyatan.

4.9 Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan desa adalah untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan pembangunan Desa Sukaraja selama periode 2020-2026.

1. Mewujudkan pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, mengupayakan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada aparatur negara, mengedepankan musyawarah Desa agar pelayanan dapat cepat dan tepat.
2. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa, meningkatkan infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan di bidang pekerjaan umum. Ketahanan pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian dan pengelolaan rumah pangan lestari melalui pelatihan-pelatihan pemberdayaan KWT dll.

BAB VI

KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju Desa Mandiri di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukaraja bersifat moderat, dengan keterlibatan aktif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur. Namun, dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan pengambilan keputusan strategis, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

2. **Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menuju Desa Mandiri adalah gender, usia, serta tingkat penghasilan dan mata pencaharian. Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan.

3. **Strategi Peningkatan Partisipasi**

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, diperlukan strategi yang lebih inklusif, seperti pemberdayaan masyarakat

melalui pelatihan, penguatan partisipasi dalam musyawarah desa, serta pengembangan ekonomi lokal dan potensi wisata desa sebagai sumber kesejahteraan yang berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah Desa**

Melakukan studi mendalam tentang desa-desa yang telah berhasil mencapai tingkat mandiri dalam berbagai aspek seperti pertanian, ekonomi lokal, pendidikan, atau lingkungan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor kunci yang mendukung partisipasi masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dan pemerintah desa juga diharapkan melibatkan pihak luar dalam perencanaan agar terciptanya daya saing dan pertumbuhan penduduk yang lebih baik.

2. **Bagi Masyarakat Desa Sukaraja**

Melakukan evaluasi terhadap proses-proses partisipatif yang ada dalam pembangunan desa mandiri, seperti forum musyawarah desa atau mekanisme pengambilan keputusan partisipatif lainnya. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan keadilan proses partisipatif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hyronimus, 2020, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Paparan Kegiatan Pendampingan Masyarakat di Kota Bengkulu
- Indrajat, Himawan dkk (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Kemiling . Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2019
- Brownill, Sue dan Juliet Carpenter (2020). Participation and planning: Dichotomies, rationalities and strategies for power. Jurnal Town Planning Review (TPR), Vol 78 (4), p 401-428
- Ndaraha, Taliziduhu. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Karya
- Hyronimus, 2017, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Paparan Kegiatan Pendampingan Masyarakat di Kota Bengkulu
- Indrajat, Himawan dkk (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Kemiling . Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2019.
- Hadi, A. P. (2021). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987, 1–14.
- Adisasmita, R. 2020. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumaryadi. 2021. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- Fistarisma Ishak, Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Tonggauana,” Skripsi, Kendari: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Kendari: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo. 2019
- Melis, Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Universitas Halu Oleo. 2021. Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara), Skripsi, 45
- Sugiyono. 2020. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta

- Sedermayanti, dan Hidayat. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung Mandala Maju
- Solekhan. 2019. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: SETARA Press
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif. Bandung: alfabeta
- Ardilah, T. (2019). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University)
- Slamet, Y. (2020). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Dewey, J. (2021). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. Macmillan.
- Hubeis AVS. 2020. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. IPB Press Bogor.
- Rinawati R. PARTISIPASI WANITA DALAM PEMBANGUNAN (Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat). Mimbar 2020;XX:387–405.
- Slamet, 1994, Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Surakarta, Sebelas Maret University Press
- Hakim, L. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana, 2(2), 43-53

Peraturan

Undang-undang Nomor 6, Tahun 2014, Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa UU pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014

Peraturan menteri nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa